

PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE - SULAWESI SELATAN

M. Mujahid Shaleh¹

¹Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah,
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

mujahid.shaleh@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi antar individu maupun wilayah saat ini masih dialami oleh Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Fenomena kemiskinan dan ketidakadilan global ditunjukkan dengan adanya 20% populasi dunia yang mampu menikmati lebih dari 70% pendapatan dunia, atau dengan kata lain sebanyak 80% populasi dunia hanya mampu menikmati kurang dari 30% pendapatan dunia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan periode 2013-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif menggunakan Analisis Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, dengan menggunakan data Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio dan Indek Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019. Hasil analisis Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif menunjukkan Pertumbuhan inklusif Sulawesi Selatan sudah termasuk kedalam kategori memuaskan dengan capaian Indeks 6,00 namun masih pada level menengah dengan menempati posisi ke 15 dari 34 Provinsi Se-Indonesia.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif; Ketimpangan; Kemiskinan

Abstract

The problems of poverty and socio-economic inequality between individuals and regions are still experienced by Indonesia and other countries in the world. The phenomenon of global poverty and injustice is shown by the existence of 20% of the world's population who are able to enjoy more than 70% of world income, or in other words as much as 80% of the world's population can only enjoy less than 30% of world income. This study aims to provide an overview of the development of the National, Provincial and District / City Inclusive Economic Development Index Achievements in South Sulawesi for the period 2013-2019. The method used in this research is descriptive quantitative using Inclusive Economic Development Index Analysis, using data on Economic Growth Rate, GRDP Per Capita, Poverty Level, Open Unemployment Rate, Gini Ratio and Human Development Index for South Sulawesi Province and Districts / Cities in South Sulawesi. In 2019. The results of the analysis of the Inclusive Economic Development Index show that South Sulawesi's inclusive growth has been included in the satisfactory category with an index of 6.00 but is still at the intermediate level, occupying the 15th position out of 34 Provinces in Indonesia.

Keywords: Inclusive Economic Development Index; Inequality; Poverty

PENDAHULUAN

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, banyak yang terjebak dalam ekonomi ekslusif yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian negara-negara maju dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dengan memacu pertumbuhan ekonomi sektor sekunder (industri manufaktur) dan tersier (industri jasa). Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi tetapi hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Disisi lain yakni di sektor primer, terutama sektor pertanian, kurang mendapatkan perhatian padahal sektor tersebut banyak sekali menyerap tenaga kerja. Akibatnya terjadilah ketimpangan pendapatan antar penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dengan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini terbukti dengan data pertumbuhan ekonomi dari BPS pada tahun 2015 sebesar 4,88% menjadi 5,02% pada tahun 2019, sedang Indeks Gini masih berada pada kisaran 0,381 sampai dengan awal tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak secara otomatis mereduksi ketimpangan ekonomi sosial. Demikian juga apabila dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi juga masih menunjukkan adanya ketimpangan. Kontribusi PDB Jawa dan Sumatera sebesar 80,31% (2019) sedangkan wilayah lainnya yaitu Kalimantan (8,05%), Sulawesi (6,33%), Papua (2,24%) dan Bali Nusa Tenggara (3,06%). Dari data tersebut tampak sekali adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun namun kondisi tersebut juga dibarengi dengan peningkatan kesenjangan kekayaan antar penduduk, peningkatan Indeks Gini dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Dampak dari kondisi tersebut masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin tertinggal jauh oleh masyarakat kelas menengah dan atas.

Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini yang membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Menurut kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat. Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan

daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat.

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi ketimpangan. Peningkatan pendapatan perkapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan perkapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata.

Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisanya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Di dalam teori tersebut dimunculkan bahwa sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah dan kemudian hipotesa ini dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik.

TINJAUAN PUSTAKA

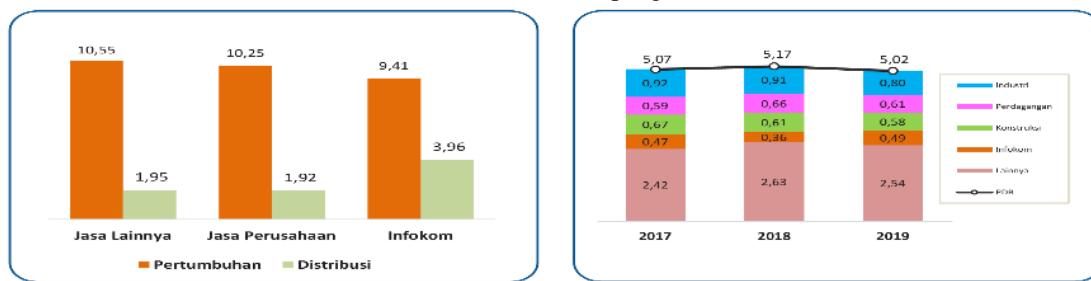
Berikut diuraikan beberapa Indikator Makro di tingkat Nasional yang mempengaruhi pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif:

1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019

Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen; diikuti Jasa Perusahaan sebesar 10,25 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 9,41 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 0,80 persen; diikuti Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,61 persen; Konstruksi sebesar 0,58 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,49 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,54 persen.

Grafik 1. Pertumbuhan dan Distribusi PDB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2019 (Persen), Serta Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 2017-2019 (Persen)



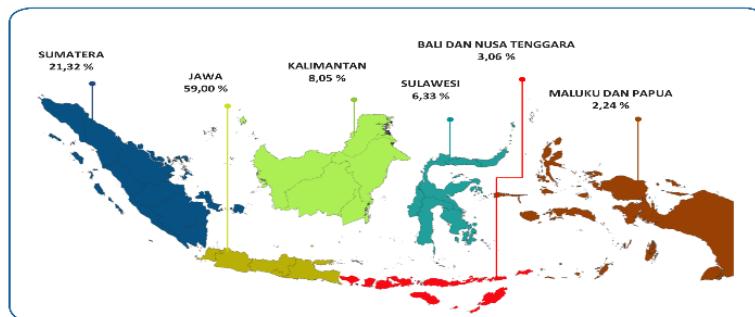
Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2020

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,70 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,01 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,72; dan Konstruksi sebesar 10,75 persen. Peranan keempat

lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,18 persen.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 59,00 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32 persen, Pulau Kalimantan 8,05 persen, Pulau Sulawesi 6,33 persen, dan sisanya 5,30 persen di pulau-pulau lainnya.

Gambar 1. Peranan Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional Tahun 2019 (Persen)

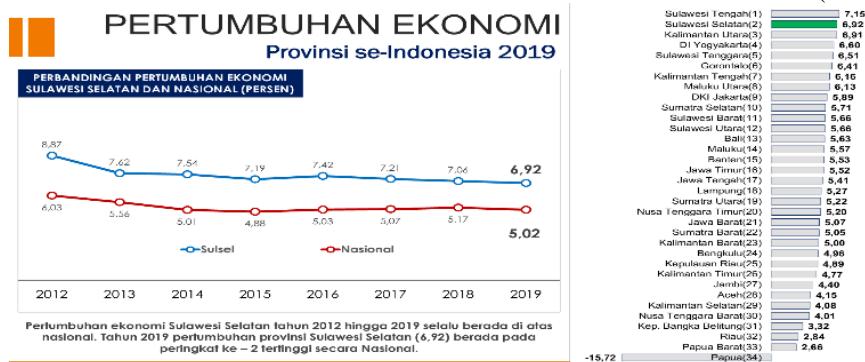


Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2020

Tahun 2019, Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 7,15,

sedangkan Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah tercatat di Provinsi Papua yaitu -15,72.

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Indonesia Tahun 2019 (Persen)



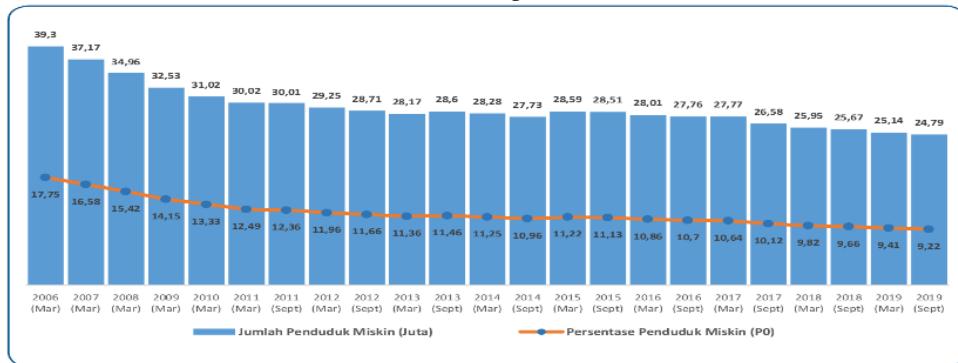
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020

2. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019

Secara umum, pada periode 2006–September 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013 dan Maret 2015. Kenaikan

jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2006 sampai dengan September 2019.

Grafik 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Tahun 2016 - September 2019



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Dibandingkan Maret 2019, jumlah penduduk miskin menurun 358,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2018, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 888,7 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2019 tercatat sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan

menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2019 –September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 137 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 221,8 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,69 persen menjadi 6,56 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,85 persen menjadi 12,60 persen.

Tabel 2. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2019

Pulau	Persentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	8,09	11,16	9,82	2 062,94	3 709,47	5 772,41
Jawa	6,36	12,01	8,29	6 338,47	6 217,43	12 555,90
Bali dan Nusa Tenggara	8,36	17,50	13,36	564,78	1 427,26	1 992,04
Kalimantan	4,18	7,27	5,81	329,36	632,15	961,51
Sulawesi	5,42	13,21	10,07	432,49	1 556,27	1 988,76
Maluku dan Papua	5,13	28,28	20,39	129,70	1 385,53	1 515,23
Indonesia	6,56	12,60	9,22	9 857,74	14 928,11	24 785,85

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2019

Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,39 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu

sebesar 5,81 persen. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (12,56 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,96 juta orang).



Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020

Tahun 2019, Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah DKI Jakarta sebesar 3,42 persen, sedangkan Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Papua dengan 26,55 persen.

3. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Tahun 2019

Jumlah angkatan kerja pada agustus 2019 sebanyak 133,56 juta orang, naik 2,55 juta orang dibanding agustus 2018. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Agustus 2019, sebanyak 126,51 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 7,05 juta orang menganggur. Dibanding setahunlalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 2,50 juta orang dan pengangguran meningkat 50 ribu orang.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) juga meningkat. TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 67,49 persen, meningkat 0,23 persen poin dibandingkan Agustus 2018. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan (Supply) tenaga kerja yang juga meningkat. Pada periode Agustus 2015-Agustus 2019, TPAK mengalami peningkatan sebesar 1,73 persen poin.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2019, TPAK laki-laki sebesar 83,13 persen dan TPAK perempuan sebesar 51,89 persen. Selama tahun 2015-2019, TPAK mengalami peningkatan yang lebih tinggi (3,02 persen poin) dibandingkat TPAK laki-laki (0,42 persen poin).

Tabel 3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Agustus 2015-2019

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2015	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018	Agustus 2019	Perubahan 1 Tahun (Ags 2018-Ags 2019)		
	(1) juta orang	(2) juta orang	(3) juta orang	(4) juta orang	(5) juta orang	(6) juta orang	(7) persen	(8) persen
Penduduk Usia Kerja	186,01	189,10	192,08	194,78	197,91	3,13	1,61	
Angkatan Kerja	122,38	125,44	128,06	131,01	133,56	2,55	1,95	
Bekerja	114,82	118,41	121,02	124,01	126,51	2,50	2,02	
Pengangguran	7,56	7,03	7,04	7,00	7,05	0,05	0,71	
Bukan Angkatan Kerja	63,73	63,66	64,02	63,77	64,35	0,58	0,91	
	persen	persen	persen	persen	persen	persen poin		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,18	5,61	5,50	5,34	5,28	-0,06		
Perkotaan	7,31	6,60	6,79	6,45	6,31	-0,14		
Perdesaan	4,93	4,51	4,01	4,04	3,99	-0,05		
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,76	66,34	66,67	67,26	67,49	0,23		
Laki-laki	82,71	81,97	82,51	82,69	83,13	0,44		
Perempuan	48,87	50,77	50,89	51,88	51,89	0,01		

Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2015-2019

Adapun Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Tahun 2019 adalah Provinsi Bantensebesar 8,11 persen,

sedangkan Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah Provinsi Bali sebesar 1,52 persen.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Agustus 2015-2019

Provinsi	Agustus 2015	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018	Agustus 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Acob	9,93	7,57	6,57	6,36	6,20
Sumatera Utara	6,71	5,84	5,60	5,56	5,41
Sumatera Barat	6,89	5,09	5,58	5,55	5,33
Riau	7,83	7,43	6,22	6,20	5,97
Jambi	4,34	4,00	3,87	3,86	4,19
Sumatera Selatan	6,07	4,31	4,39	4,23	4,48
Bengkulu	4,91	3,30	3,74	3,51	3,39
Lampung	5,14	4,62	4,33	4,06	4,03
Bangka Belitung	6,29	2,60	3,78	3,65	3,62
Kepulauan Riau	6,20	7,69	7,16	7,12	6,91
DKI Jakarta	7,23	6,12	7,14	6,24	6,22
Jawa Barat	8,72	8,89	8,22	8,17	7,99
Jawa Tengah	4,99	4,63	4,57	4,51	4,49
DI Yogyakarta	5,07	2,72	3,02	3,35	3,14
Jawa Timur	4,47	4,21	4,00	3,99	3,92
Banten	9,55	8,92	9,28	8,52	8,11
Bali	1,99	1,89	1,48	1,37	1,52
Nusa Tenggara Barat	5,69	3,94	3,32	3,72	3,42
Nusa Tenggara Timur	3,83	3,25	3,27	3,01	3,35
Kalimantan Barat	5,15	4,23	4,36	4,26	4,45
Kalimantan Tengah	4,54	4,82	4,23	4,01	4,10
Kalimantan Selatan	4,92	5,45	4,77	4,50	4,31
Kalimantan Timur	7,50	7,95	6,91	6,60	6,09
Kalimantan Utara	5,68	5,23	5,54	5,22	4,40
Sulawesi Utara	9,03	6,18	7,18	6,86	6,25
Sulawesi Tengah	4,10	3,29	3,81	3,43	3,19
Sulawesi Selatan	5,95	4,80	5,61	5,34	4,97
Sulawesi Tenggara	5,65	2,91	3,50	3,26	3,65
Gorontalo	4,68	2,76	4,28	4,03	4,06
Sulawesi Barat	3,35	3,33	3,21	3,16	3,18
Maluku	9,03	7,05	2,29	7,77	7,08
Maluku Utara	6,05	4,01	5,33	4,77	4,07
Papua Barat	8,08	7,46	6,49	6,30	6,24
Papua	3,99	3,35	3,62	3,20	3,65
Total	6,18	5,61	5,50	5,34	5,28

Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2015 - 2019

4. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Tahun 2019

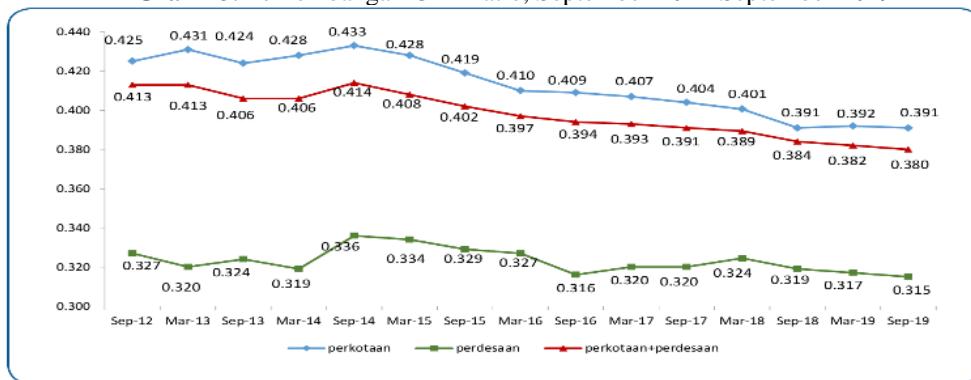
Secara nasional, nilai Gini Ratio Indonesia selama periode 2012–September 2014 mengalami fluktuasi namun mulai Maret 2015 hingga September 2019 nilainya terus menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015 –September 2019 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2019 adalah sebesar 0,391. Hal ini

menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,001 poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 0,392. Sementara jika dibanding September 2018 memiliki nilai poin yang sama yaitu 0,391.

Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2019 tercatat sebesar 0,315, turun sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 dan turun sebesar 0,004 poin dibandingkan dengan kondisi September 2018. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2019 dan September 2018 masing-masing tercatat sebesar 0,317 dan 0,319.

Grafik 3. Perkembangan Gini Ratio, September 2012-September 2019



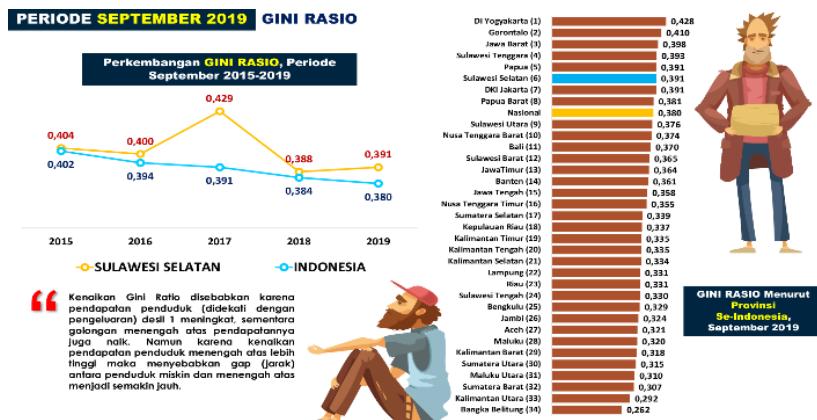
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada September 2019, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,428. Sementara Gini Ratio terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,262.

Dibanding dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,380, terdapat delapan provinsi

dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,428), Gorontalo (0,410), Jawa Barat (0,398), Sulawesi Tenggara (0,393), DKI Jakarta (0,391), Papua (0,391), Sulawesi Selatan (0,391), dan Papua Barat (0,381).

Gambar 4. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Se-Indonesia, September 2019



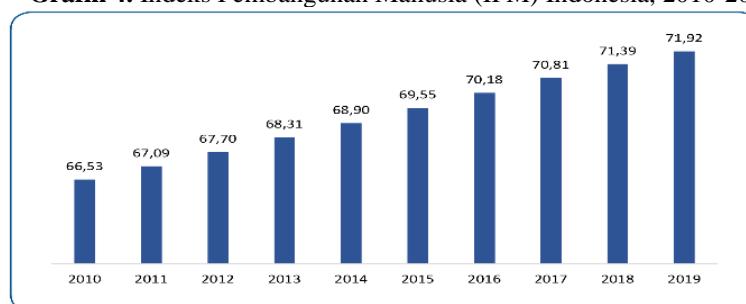
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2019. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Pada periode 2018–2019, IPM Indonesia tumbuh 0,74 persen.

Grafik 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, 2010-2019



Sumber: Berita Resmi Statistik Statistik BPS, 2020

Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Selama periode 2010–2019, peningkatan IPM

didorong oleh kenaikan setiap komponen pembentuknya.

Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Menurut Komponen, Tahun 2010-2019

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	69,81	70,01	70,20	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06	71,20	71,34
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,29	11,44	11,68	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10	8,17	8,34
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	9.437	9.647	9.815	9.858	9.903	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299
IPM		66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

Sumber: Berita Resmi Statistik Statistik BPS, 2020

Pada tahun 2019, pencapaian pembangunan manusia di tingkat provinsi cukup bervariasi. IPM pada level provinsi berkisar antara 60,84 (Papua) hingga 80,76 (DKI Jakarta). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 64,82 tahun (Sulawesi Barat) hingga 74,92 tahun (DI Yogyakarta). Sementara itu, pada dimensi pengetahuan,

Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,05 tahun (Papua) hingga 15,58 tahun (DI Yogyakarta), serta Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas berkisar antara 6,65 tahun (Papua) hingga 11,06 tahun (DKI Jakarta). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) di tingkat provinsi berkisar antara 7,3 juta rupiah per tahun (Papua) hingga 18,5 juta rupiah per tahun (DKI Jakarta).

Gambar 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Se-Indonesia, Tahun 2019



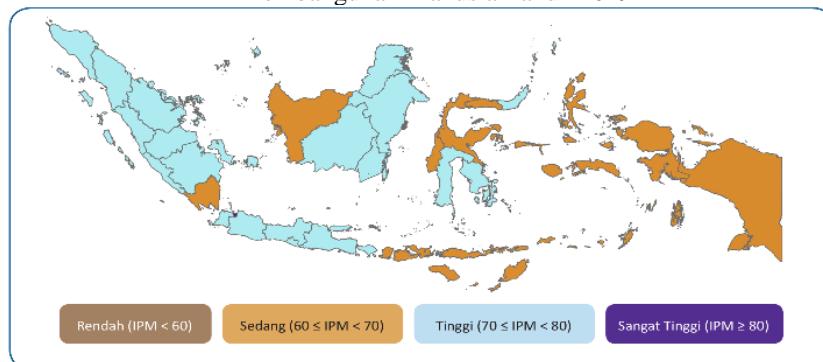
Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2019 juga terlihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat provinsi. Jumlah provinsi yang berstatus “sedang” berkurang dari 12 provinsi pada tahun 2018 menjadi 11 provinsi pada tahun 2019. Provinsi Sumatera Selatan yang berstatus “sedang” pada tahun 2018 berubah status menjadi “tinggi” pada tahun 2019.

Hingga saat ini, terdapat 22 provinsi yang berstatus pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Sejak tahun 2018, tidak ada provinsi yang berstatus pembangunan manusia “rendah” di Indonesia. Hal ini karena pada tahun 2018, status pembangunan manusia di Provinsi Papua telah berada pada level “sedang”. Peningkatan IPM di tingkat nasional juga tercermin pada level provinsi. Selama periode 2018 hingga 2019, IPM di seluruh provinsi mengalami peningkatan. Pada periode ini, tercatat tiga provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Provinsi Papua Barat (1,51 persen), Provinsi Maluku Utara (1,39 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,30 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat dan Maluku Utara didorong oleh dimensi standar hidup layak, sementara di Nusa Tenggara Timur didorong oleh dimensi pendidikan.

Gambar 6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi dan Status Pembangunan Manusia Tahun 2019



Sumber: Berita Resmi Statistik Statistik BPS, 2020

Berikut akan diuraikan gambaran capaian indikator makro Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019:

Gambar 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019

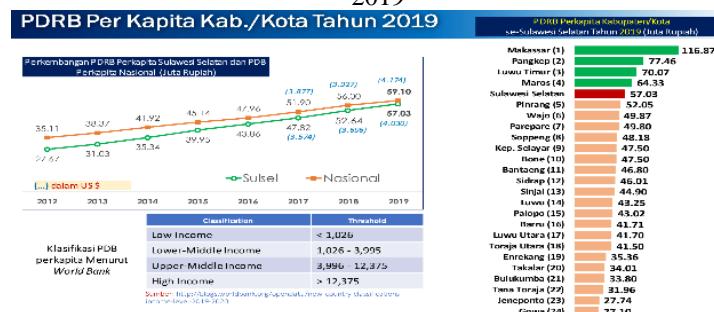


Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 mencapai 6,92 persen, sedangkan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019 dengan Pertumbuhan Ekonomi

tertinggi adalah Kabupaten Bantaeng sebesar 10,75 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Luwu Timur sebesar 1,17 persen.

Gambar 8. PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019

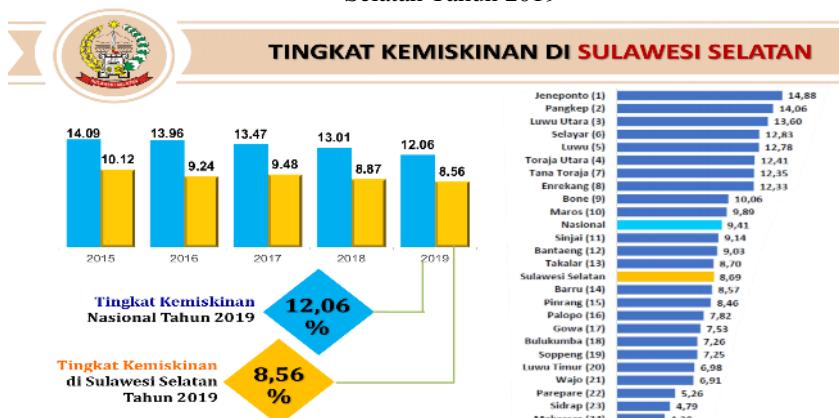


Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020

Untuk PDRB Per Kapita Sulawesi Selatan Tahun 2019 mencapai 57,03 juta rupiah, sedangkan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019 dengan PDRB Per Kapita tertinggi

adalah Kota Makassar sebesar 116,87 juta rupiah dan yang terendah adalah Kabupaten Gowa sebesar 27,10 juta rupiah.

Gambar 9. Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019



Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020

Pada Tahun 2019 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,56 persen, sedangkan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019 dengan Tingkat Kemiskinan tertinggi

adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 14,88 persen dan yang terendah adalah Kota Makassar sebesar 4,28 persen.

Gambar 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019



Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020

Pada Tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,97 persen, sedangkan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019 dengan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi adalah Kota Makassar sebesar 10,39 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 1,17 persen.

Gambar 11. Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019

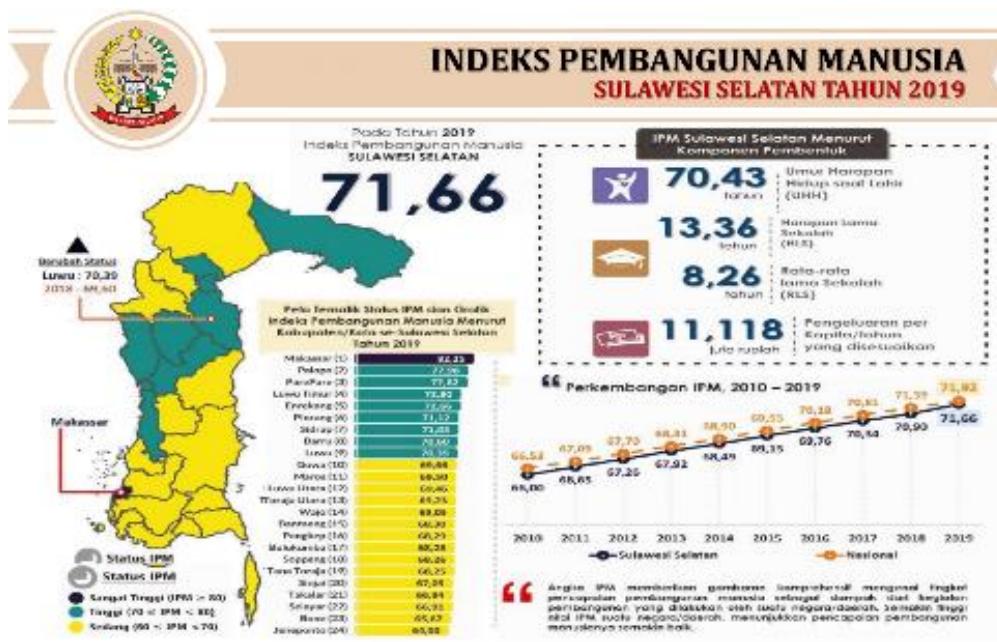


Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020

Pada Tahun 2019 Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,389, sedangkan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019

dengan Gini Ratio tertinggi adalah Kabupaten Takalar sebesar 0,482 dan yang terendah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,284.

Gambar 12. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019



Sumber: Publikasi Badan Pusat Statistik, 2020

Pada Tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71,66, sedangkan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019 dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi adalah Kota Makassar sebesar 82,25 dan yang terendah adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 64,00.

Maksud penelitian ini adalah memahami pengertian **Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif** dan memberikan gambaran perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Selatan, serta menganalisa perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan terhadap data-data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan menggunakan data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diperoleh dari Publikasi The

SMERU Research Institute, Badan Pusat Statistik (BPS) maupun literatur lain yang sesuai dengan topik penelitian ini.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data urut waktu (time series) yang diperoleh dari hasil Analisis Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, dengan menggunakan data Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Gini Ratio dan Indek Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019.

Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui ukuran pertumbuhan inklusif, digunakan pengukuran yang dirumuskan oleh Klasen (2010), dimana rumus pertumbuhan inklusif diadopsi dari konsep Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar-kelompok dan wilayah. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada dasarnya merupakan suatu

ukuran yang komprehensif dalam melihat dan mengukur tingkat inklusivitas dari pembangunan Indonesia saat ini dan ke depannya. Indeks

Pembangunan Ekonomi Inklusif yang telah dikeluarkan oleh Bappenas terbagi menjadi tiga pilar dan delapan sub-pilar utama, yaitu :

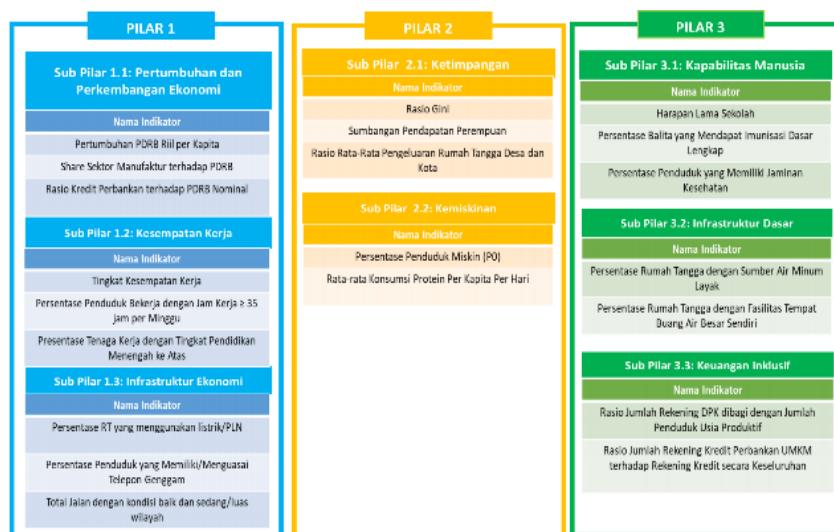
Gambar 1. Pilar-Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif



Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur berbagai aspek pembangunan yang dapat mendukung arah pembangunan yang inklusif sehingga pembangunan ekonomi Indonesia tidak

hanya diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari berbagai aspek sosial-ekonomi yang terkandung dalam 21 indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut ialah :

Gambar 2. Indikator-Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif



Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional Tahun 2011-2019

Berikut adalah hasil penghitungan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di tingkat

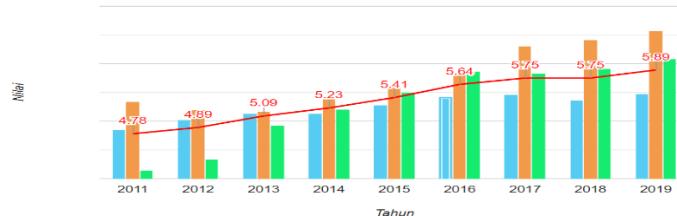
Nasional pada tahun 2011-2019 secara keseluruhan dan di ketiga pilar utama :

Tabel 1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Nasional
Tahun 2011-2019

SKALA NASIONAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PILAR 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian	4.85	5.03	5.14	5.13	5.28	5.43	5.46	5.37	5.48
PILAR 2: Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	5.34	5.20	5.17	5.44	5.59	5.85	6.30	6.42	6.57
PILAR 3: Perluasan Akses dan Kesempatan	4.15	4.34	4.93	5.21	5.50	5.87	5.83	5.91	6.09
INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF	4.78	4.89	5.09	5.23	5.41	5.64	5.75	5.75	5.89

Update: July 2020

Grafik 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Nasional
Tahun 2011 s.d 2019



Sumber : Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020

1. Secara Nasional, pertumbuhan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif sudah memberikan hasil yang memuaskan selama sembilan periode perhitungan (2011-2019). Terlihat dari tren indeks yang terus meningkat dan mencapai 5,89 pada tahun 2019 yang merupakan nilai indeks yang sudah termasuk kedalam **KATEGORI MEMUASKAN**. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia semakin lama semakin inklusif dan berkualitas;
2. Dilihat dari Pilar 1, secara Nasional indeks pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2011-2019, meskipun sempat menurun sedikit pada tahun 2014 disebabkan menurunnya indeks sub pilar indeks pertumbuhan ekonomi, tetapi berhasil meningkat lagi ditahun selanjutnya;
3. Dilihat dari Pilar 2, secara Nasional indeks pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di Indonesia cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2011 menuju 2012 dan 2013 yang mengalami penurunan indeks, tetapi berhasil meningkat lagi pada

tahun 2015 hingga 2019. Dibandingkan dengan pilar 1 dan 3, pilar 2 memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk indeks pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan lebih inklusif dan semakin membaik; Dilihat dari Pilar 3, secara Nasional indeks perluasan akses dan kesempatan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat selama periode tahun 2011-2016. Namun pada tahun 2017, indeks perluasan akses dan kesempatan mengalami penurunan. Hal ini karena menurunnya indeks sub pilar kapabilitas manusia. Selanjutnya pada Tahun 2018 meningkat kembali dan terus meningkat di tahun 2019.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Provinsi Tahun 2013-2019

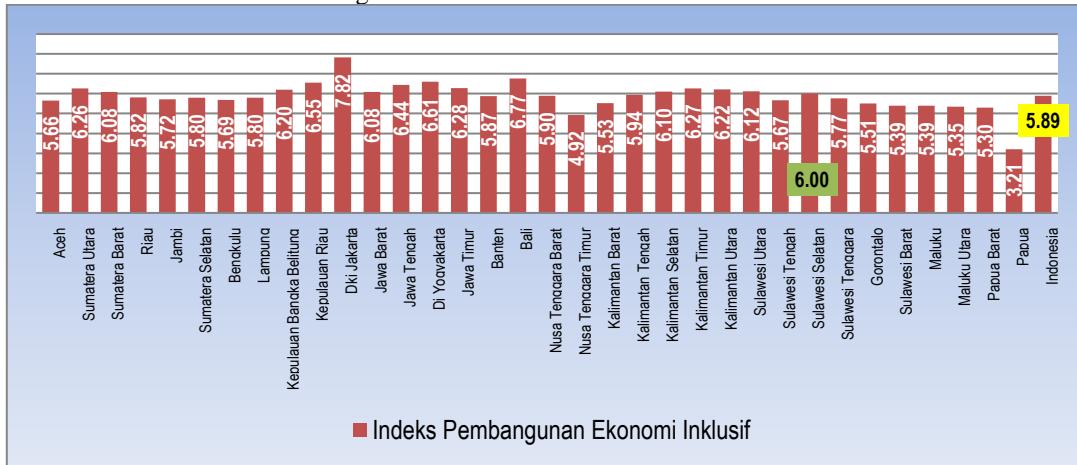
Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif selain berdasarkan tingkat Nasional juga dihitung berdasarkan tingkat Sub-Nasional, yaitu 34 Provinsi di Indonesia untuk tahun 2013-2019. Berikut adalah hasil penghitungan indeks di tingkat Provinsi :

Tabel 2. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Provinsi Tahun 2013-2019

Kode	PROVINSI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11	Aceh	4.68	4.78	4.87	5.38	5.55	5.53	5.66
12	Sumatera Utara	5.41	5.68	5.81	5.98	6.11	6.06	6.26
13	Sumatera Barat	5.28	5.43	5.69	5.97	5.95	5.91	6.08
14	Riau	5.03	5.14	5.20	5.49	5.65	5.70	5.82
15	Jambi	5.09	5.15	5.19	5.38	5.49	5.63	5.72
16	Sumatera Selatan	5.01	5.04	5.37	5.66	5.82	5.70	5.80
17	Bengkulu	4.98	5.22	5.31	5.52	5.54	5.51	5.69
18	Lampung	4.97	5.08	5.22	5.39	5.60	5.61	5.80
19	Kepulauan Bangka Belitung	5.66	5.74	6.02	6.30	6.25	6.19	6.20
21	Kepulauan Riau	5.98	5.92	6.31	6.32	6.31	6.43	6.55
31	Dki Jakarta	6.56	6.71	7.00	7.26	7.36	7.65	7.82
32	Jawa Barat	5.24	5.40	5.65	5.85	5.93	6.01	6.08
33	Jawa Tengah	5.53	5.71	5.89	6.08	6.27	6.25	6.44
34	Di Yogyakarta	6.01	6.13	6.15	6.32	6.44	6.49	6.61
35	Jawa Timur	5.53	5.68	5.67	5.94	6.06	6.12	6.28
36	Banten	5.16	5.19	5.34	5.58	5.60	5.52	5.87
51	Bali	6.13	6.22	6.48	6.69	6.49	6.62	6.77
52	Nusa Tenggara Barat	4.81	4.93	5.68	5.52	5.28	5.02	5.90
53	Nusa Tenggara Timur	4.06	4.23	4.25	4.56	4.79	4.82	4.92
61	Kalimantan Barat	4.64	4.76	4.95	5.20	5.16	5.32	5.53
62	Kalimantan Tengah	5.03	5.17	5.50	5.62	5.81	5.74	5.94
63	Kalimantan Selatan	5.31	5.45	5.66	5.94	6.00	5.92	6.10
64	Kalimantan Timur	5.53	5.32	5.72	5.84	6.03	5.99	6.27
65	Kalimantan Utara	0.00	0.00	5.45	5.67	5.88	6.05	6.22
71	Sulawesi Utara	5.14	5.29	5.56	5.71	5.80	5.78	6.12
72	Sulawesi Tengah	4.73	4.75	5.33	5.38	5.41	5.39	5.67
73	Sulawesi Selatan	5.13	5.31	5.42	5.56	5.73	5.77	6.00
74	Sulawesi Tenggara	4.84	4.93	5.21	5.53	5.63	5.52	5.77
75	Gorontalo	4.44	4.68	4.79	5.18	5.15	5.26	5.51
76	Sulawesi Barat	4.49	4.77	4.82	5.14	5.17	5.12	5.39
81	Maluku	4.22	4.53	4.73	4.98	5.09	5.14	5.39
82	Maluku Utara	4.62	4.66	4.93	5.24	5.27	5.30	5.35
91	Papua Barat	4.10	4.25	4.49	4.81	4.89	5.20	5.30
94	Papua	2.59	2.77	3.02	3.32	3.43	3.67	3.21
99	Indonesia	5.09	5.23	5.41	5.64	5.75	5.75	5.89

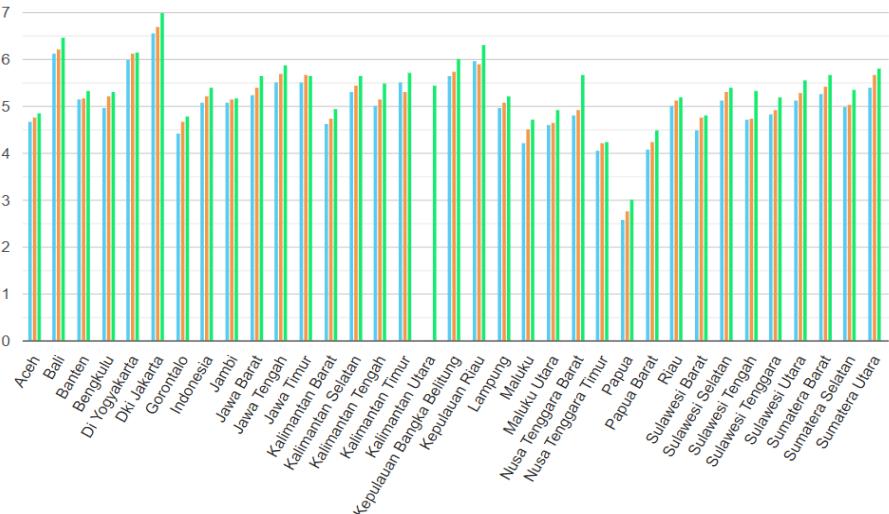
Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020

Grafik 2. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia dan Provinsi Tahun 2019



Sumber : Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020

Grafik 3. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia dan Provinsi Tahun 2019 Berdasarkan 3 Pilar



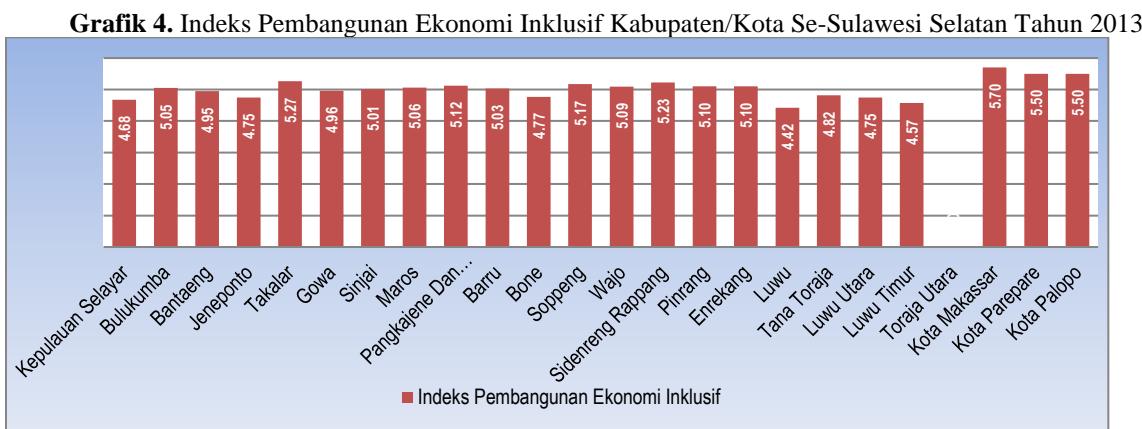
Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020

Dilihat dari keseluruhan pilar, pada tahun 2019 DKI Jakarta mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 7,82. Sedangkan Provinsi yang paling tidak inklusif pada tahun 2019 adalah Papua dengan nilai 3,21. Nilai indeks secara Nasional pada tahun 2019 adalah 5,89. Dari grafik diatas juga terlihat bahwa sudah cukup banyak Provinsi-Provinsi di Indonesia yang memiliki nilai indeks diatas indeks nasional/Indonesia. Mengindikasikan bahwa sudah cukup banyak daerah yang kondisi ekonominya cukup inklusif diatas rata-rata Nasional.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Tingkat Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2013-2019

Untuk melihat perkembangan capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, berikut adalah hasil penghitungan indeks di tingkat Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Selatan Tahun 2013 sampai dengan tahun 2019:

1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

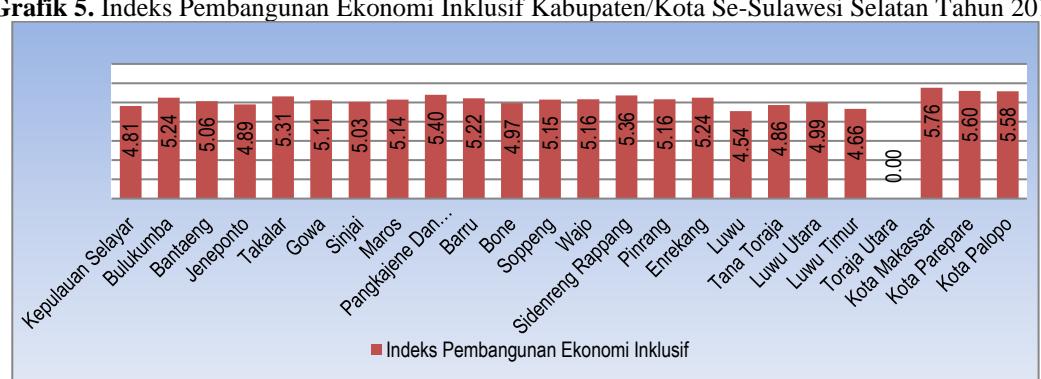


Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020

Pada tahun 2013, Kota Makassar mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 5,72, kemudian disusul oleh Kota Parepare dan Kota Palopo dengan nilai sama yakni mencapai 5,50. Sedangkan 2 Kabupaten yang masuk dalam 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan peringkat tertinggi capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah Kabupaten

Takalar dengan nilai 5,27 dan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 5,23. Sedangkan Kabupaten yang paling tidak inklusif pada tahun 2013 adalah Kabupaten Luwu dengan nilai 4,42.

2. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

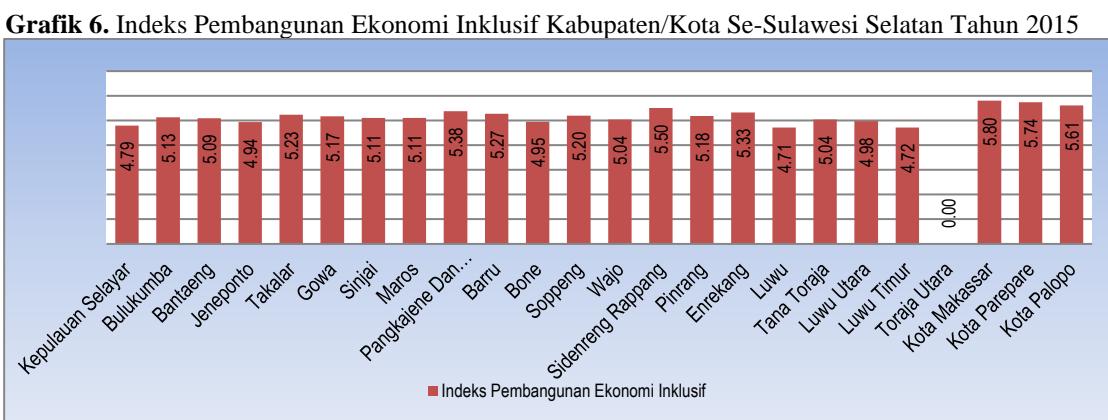


Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020

Pada tahun 2014, Kota Makassar mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 5,72, kemudian disusul oleh Kota Parepare dengan nilai 5,60 dan Kota Palopo dengan nilai 5,58. Sedangkan 2 Kabupaten yang masuk dalam 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan peringkat tertinggi capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan dengan nilai 5,40 dan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 5,36. Sedangkan Kabupaten yang paling tidak inklusif pada tahun 2014 adalah Kabupaten Luwu dengan nilai 4,54.

3. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

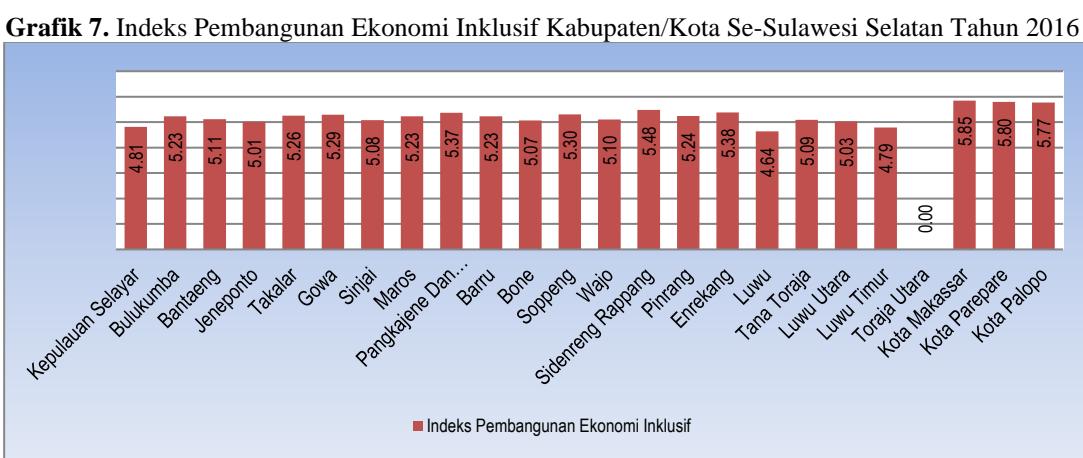


Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020

Pada tahun 2015, Kota Makassar mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 5,80, kemudian disusul oleh Kota Parepare dengan nilai 5,74 dan Kota Palopo dengan nilai 5,61. Sedangkan 2 Kabupaten yang masuk dalam 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan peringkat tertinggi capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah Kabupaten Sidenreng Rappang

dengan nilai 5,50 dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan nilai 5,38. Sedangkan Kabupaten yang paling tidak inklusif pada tahun 2015 adalah Kabupaten Luwu dengan nilai 4,71.

4. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016



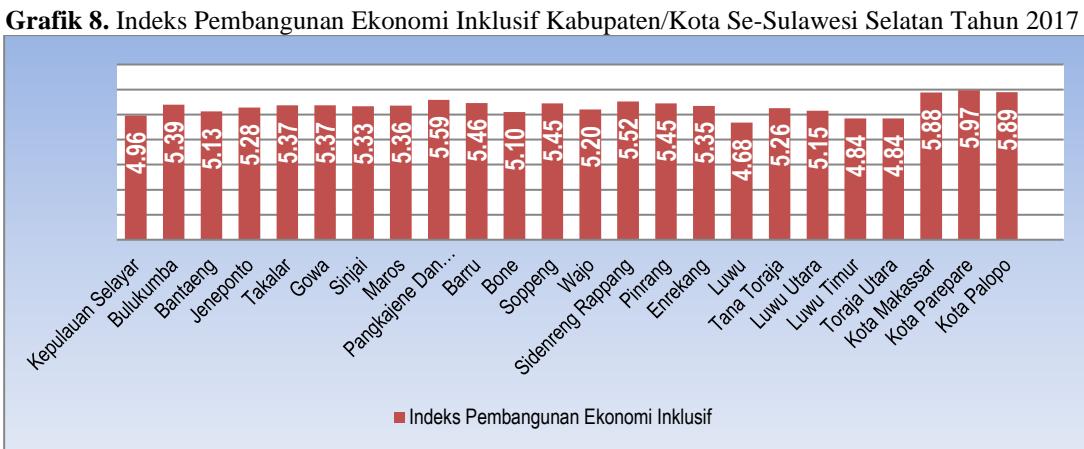
Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020

Pada tahun 2016, Kota Makassar mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 5,85, kemudian disusul oleh Kota Parepare dengan nilai 5,80 dan Kota Palopo dengan nilai 5,77. Sedangkan 2 Kabupaten yang masuk dalam 5 Kabupaten/Kota

di Provinsi Sulawesi Selatan dengan peringkat tertinggi capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 5,48 dan Kabupaten Enrekang dengan nilai 5,38. Sedangkan Kabupaten yang paling tidak

inklusif pada tahun 2016 adalah Kabupaten Luwu dengan nilai 4,64.

5. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

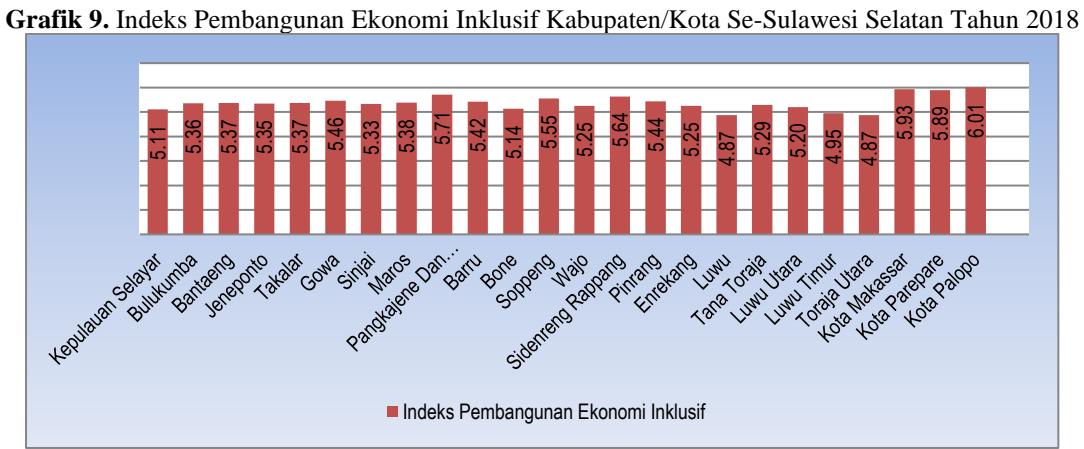


Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020

Pada tahun 2017, Kota Parepare mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 5,97, kemudian disusul oleh Kota Palopo dengan nilai 5,90 dan Kota Makassar dengan nilai 5,88. Sedangkan 2 Kabupaten yang masuk dalam 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan peringkat tertinggi capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan nilai 5,59 dan Kabupaten

Sidenreng Rappang dengan nilai 5,52. Sedangkan Kabupaten yang paling tidak inklusif pada tahun 2017 adalah Kabupaten Luwu dengan nilai 4,68.

6. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018



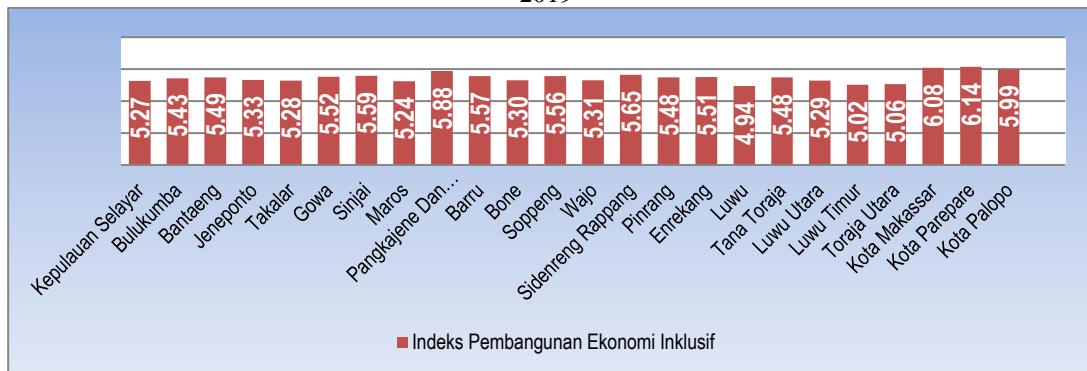
Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020

Pada tahun 2018, Kota Palopo mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 6,01, kemudian disusul oleh Kota Makassar dengan nilai 5,93 dan Kota Parepare dengan nilai 5,89. Sedangkan 2 Kabupaten yang masuk dalam 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan peringkat tertinggi capaian Indeks Pembangunan Ekonomi

Inklusif adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan nilai 5,71 dan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 5,64. Sedangkan Kabupaten yang paling tidak inklusif pada tahun 2018 adalah Kabupaten Luwu dan Kabupaten Toraja Utara dengan nilai indeks yang sama yakni 4,87.

7. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

Grafik 10. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2019



Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif SMERU, 2020

Pada tahun 2019, Kota Parepare mendapatkan nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi, yakni mencapai 6,14, kemudian disusul oleh Kota Makassar dengan nilai 6,08 dan Kota Palopo dengan nilai 5,99. Sedangkan 2 Kabupaten yang masuk dalam 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan peringkat tertinggi capaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan nilai 5,88 dan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 5,65. Sedangkan Kabupaten yang paling tidak inklusif pada tahun 2019 adalah Kabupaten Luwu dan Kabupaten Toraja Utara dengan nilai indeks yang sama yakni 4,94.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, berikut beberapa poin kesimpulan:

1. Secara Nasional, pertumbuhan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif sudah memberikan hasil yang memuaskan selama sembilan periode perhitungan (2011-2019). Terlihat dari tren indeks yang terus meningkat dan mencapai 5,89 pada tahun 2019 yang merupakan nilai indeks yang sudah termasuk kedalam **KATEGORI MEMUASKAN**. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia semakin lama semakin inklusif dan berkualitas
2. Kualitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan terutama dalam upaya program pengurangan kesenjangan distribusi pendapatan dan juga kesenjangan pendapatan antar Kabupaten/Kota;
3. Pertumbuhan ekonomi relatif selaras dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, kesetaraan gender, kualitas kesehatan, dan kualitas pendidikan, dan kemudahan akses air dan sanitasi. Namun demikian program perlindungan sosial belum menemukan model yang tepat untuk menjangkau sasaran;
4. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan memuaskan tetapi belum inklusif. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh belum dibarengi oleh penurunan yang nyata kesenjangan distribusi pendapatan serta belum meratanya distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota, share pendapatan 60 persen terendah dari populasi penduduk masih rendah (di bawah 30 persen), belum adanya peningkatan yang signifikan share sektor industri, jasa, dan pertanian peningkatan share tenaga kerja industri juga belum signifikan, dan share tenaga kerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga tidak dibayar juga belum menunjukkan peningkatan yang nyata;
5. Pertumbuhan inklusif Sulawesi Selatan sudah termasuk kedalam **KATEGORI MEMUASKAN** dengan capaian Indeks 6,00 namun masih pada level menengah dengan menempati posisi ke 15 dari 34 Provinsi Se-Indonesia;
6. Tujuan pembangunan ekonomi pada hakikatnya tidak hanya mencapai pertumbuhan yang tinggi tetapi juga bagaimana pertumbuhan yang tinggi tersebut

- dapat merata pada seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7. Pertumbuhan inklusif semua Kabupaten/Kota Tahun 2019 sudah cukup memuaskan namun kurang merata karena dari 24 Kabupaten/Kota terdapat 13 Kabupaten yang berada dibawah 5,50 dan masih 1 Kabupaten/Kota yang nilai capaiannya hanya mencapai 4,94 yaitu Kabupaten Luwu IGI yang dicapai pada kisaran angka 5,56-6,70 (tahun 2019);
 - 8. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pengurangan kemiskinan, namun masih menyisakan permasalahan yaitu kesenjangan kemiskinan di wilayah perkotaan dan perdesaan serta belum meratanya distribusi pendapatan;
 - 9. Dimensi kesetaraan gender dan kapabilitas manusia mencapai indeks kepuasan yang relatif tinggi. Tingginya indeks dimensi kesetaraan gender menunjukkan keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan kesempatan perempuan dalam akses pendidikan dan akses perempuan ke lapangan usaha formal non pertanian. Sementara tingginya indeks kepuasan dimensi kapabilitas manusia menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan sanitasi cukup memadai.

Saran

- 1. Prioritas penanganan yang masih menjadi “Pekerjaan Rumah” untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan agar mencapai pertumbuhan yang inklusif yang sejajar atau bahkan lebih baik dengan Provinsi lain ialah meneruskan Program percepatan laju penurunan kemiskinan;
- 2. Menemukan terobosan kebijakan dan implikasi program yang tepat dalam upaya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk dan tingkat ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota. Seperti diketahui bahwa dengan indikator PDRB per kapita terlihat ada kesenjangan yang cukup lebar, yaitu PDRB per kapita Tahun 2019 Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Enrekang jauh di bawah Kota Makassar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Luwu Timur;
- 3. Masih perlu didorong upaya peningkatan peran tenaga kerja produktif sehingga selanjutnya diharapkan akan mampu meningkatkan porsi bagian “Kue Ekonomi” hasil pembangunan bagi golongan 60 persen penduduk berpendapatan terendah;

- 4. Pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan di semua sektor juga masih perlu ditingkatkan agar level inklusivitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan lebih dari memuaskan melebihi level dan kualitas yang dicapai saat ini. Hal ini berkaitan erat juga dengan upaya untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 “SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF, DAN BERKARAKTER”.

DAFTAR PUSTAKA

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2020

McKinley, Terry. 2010. Inklusif Growth Criteria and Indicators: an Inklusif Growth Index for Diagnosis of Country Progress. ADB Sustainable Development Working Paper Series, No. 14. Manila: Asian Development Bank

Mudrajad Kuncoro. (2006) Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan kebijakan. Yogyakarta, UPP STIM YKPN

Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo, S. 2012. Pembangunan inklusif: prospek dan tantangan Indonesia. Jakarta: LP3ES: Prakarsa

Publikasi Badan Pusat Statistik :
<https://www.bps.go.id/>

Publikasi The SMERU Research Institute. 2020:
<http://inklusif.bappenas.go.id/>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Sadono, Sukirno. 2010. Makroekonomi. Teori Pengantar. Edisi Ketiga. PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta

Sjafrizal, 2012, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Jakarta, Jurnal Buletin Prisma

Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan. 2018. Penjelasan Ringkas : Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tumenggung, Syafrudin A., 1997, "Paradigma Ekonomi Wilayah: Tinjauan Teori dan Praktis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijaksanaan Pembangunan," dalam Tjahjati dan. Kusbiantoro (Penyunting), Bunga Rampai: Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta